

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PEMEGANG HAK
INDIKASI GEOGRAFIS CARICA DIENG DI KABUPATEN WONOSOBO
DITINJAU DARI UU NO. 20 TAHUN 2016**

Oleh:

Christ Prihantoro Pamungkas

Masyarakat Pemegang Hak Indikasi Geografis Carica Dieng sebagai pemegang hak harus mendapatkan dukungan pemerintah selaku regulator dan pemerintah perlu melakukan pengawasan serta penerapan kebijakan yang sesuai sebagai produk implementasi Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dikarenakan Dieng terbagi dalam 2 wilayah kabupaten sehingga besar kemungkinan munculnya sengketa merek berkaitan dengan Carica Dieng serta perlu adanya kebijakan baik represif maupun preventif dari pemerintah kabupaten.

Peneliti melakukan observasi lapangan terhadap Pemerintah Daerah selaku regulator serta UMKM dan MPIG sebagai pelaku usaha untuk mengkonfirmasi adanya permasalahan hukum yang timbul atas dualism wilayah dataran tinggi Dieng. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris menggunakan data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi Pustaka, pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini, pemerintah selaku regulator belum maksimal dalam hal pengawasan terhadap UMKM maupun MPIG Carica Dieng serta penerapan kebijakan yang kurang tepat sehingga banyak UMKM Carica yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota MPIG Carica dieng; pemerintah selaku regulator perlu melakukan terobosan kebijakan serta pola pengawasan yang terstruktur untuk meningkatkan komoditas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah untuk menjaring perekonomian melalui komoditas Carica agar nantinya menjadi satu pintu; terkait dengan dampak pelanggaran yang dilakukan sifatnya mendatang karena dataran tinggi Dieng mempunyai dualisme kekuasaan daerah yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara sehingga perlu adanya upaya mediasi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk optimalisasi perlindungan indikasi geografis serta penyuluhan kepada UMKM dan pelaku usaha serupa mengenai pentingnya klaim atas indikasi geografis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Carica Dieng

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF COMMUNITIES HOLDING THE CARICA DIENG GEOGRAPHICAL INDICATION RIGHT IN WONOSOBO DISTRICT REVIEWED FROM LAW NUMBER 20 OF 2016

By :

Christ Prihantoro Pamungkas

The Community of Carica Dieng Geographical Indication Rights Holders as rights holders must receive support from the government as a regulator and the government needs to supervise and implement appropriate policies as a product of implementing Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Because Dieng is divided into 2 districts, there is a high possibility of brand disputes related to Carica Dieng arising and there is a need for both repressive and preventive policies from the district government.

Researchers conducted field observations of the Regional Government as the regulator as well as MSMEs and MPIG as business actors to confirm the existence of legal problems arising from the dualism of the Dieng Plateau region. The approach used is Empirical Juridical using Primary and Secondary data. Data collection was carried out through interviews and literature study, data processing was carried out by data selection, data classification and data preparation, then analyzed qualitatively.

The results of this research show that the government as a regulator has not been optimal in terms of supervision of MSMEs and MPIG Carica Dieng and the implementation of policies is not appropriate so that many MSMEs in Carica are reluctant to register as members of MPIG Carica Dieng; the government as the regulator needs to carry out policy breakthroughs and structured supervision patterns to increase economic commodities and public trust in the government to capture the economy through Carica commodities so that later it becomes one door; related to the impact of violations that are committed in the future because the Dieng Plateau has a dualism of regional power, namely Wonosobo Regency and Banjarnegara Regency, so there is a need for mediation efforts and policies carried out by the government to optimize the protection of geographical indications as well as providing education to MSMEs and similar business actors regarding the importance of claims for geographical indications.

Keywords : Legal Protection, Geographical Indications, Carica Dien